



**GENEALOGI KUASA DAN PENGETAHUAN: DEKONSTRUKSI PERAN
MADRASAH SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI IDEOLOGI NEGARA PADA
MASA DINASTI ABBASIYAH**

¹Eko Ngabdul Shodikin, ²Sa'adi, ³Rahmat Hariyadi

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Salatiga

e-mail: ekongabdulshodikin@gmail.com

Diterima: 31/03/2026; Direvisi: 02/04/2026; Diterbitkan: 24/04/2026

ABSTRAK

Pergumulan antara institusi pendidikan dan struktur kekuasaan politik merupakan fenomena historis yang menuntut pembacaan kritis terhadap relasi kuasa-pengetahuan dalam tradisi peradaban Islam klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi peran madrasah sebagai instrumen hegemoni ideologi negara pada masa Dinasti Abbasiyah. Dengan menggunakan desain kualitatif-historis dan pendekatan genealogi Foucauldian, studi ini membongkar bagaimana madrasah dioperasikan sebagai aparatus diskursif untuk memproduksi "rezim kebenaran". Data bersumber dari korpus teks primer seperti manuskrip Arab klasik, dokumen waqfiyah, serta analisis prosopografis terhadap biografi ulama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) institusionalisasi madrasah, khususnya jaringan Nizamiyah, berfungsi sebagai teknologi kekuasaan untuk mengonsolidasi ortodoksi Sunni dan mengeliminasi narasi alternatif; (2) sistem patronase wakaf dan birokratisasi ijazah menciptakan ketergantungan struktural ulama terhadap negara yang membatasi otonomi intelektual; dan (3) terdapat dinamika resistensi dari institusi alternatif seperti ribat sufi yang menawarkan otonomi spiritual di luar kontrol hegemonik negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa madrasah bukan sekadar lembaga transmisi pengetahuan netral, melainkan teknologi *governmentality* yang mengatur subjek religius agar selaras dengan agenda politik negara. Implikasi studi ini menawarkan kerangka kritis bagi analisis politik pengetahuan dalam institusi pendidikan Islam kontemporer.

Kata Kunci: Genealogi, Madrasah, Dinasti Abbasiyah, Hegemoni, Kuasa-Pengetahuan.

ABSTRACT

The struggle between educational institutions and political power structures is a historical phenomenon that demands a critical reading of the power-knowledge relationship within the classical Islamic civilizational tradition. This research aims to deconstruct the role of the madrasah as an instrument of state ideological hegemony during the Abbasid Dynasty. Utilizing a qualitative-historical design with a Foucauldian genealogical approach, this study uncovers how the madrasah was operated as a discursive apparatus to produce a "regime of truth". Data were sourced from a corpus of primary texts, including classical Arabic manuscripts, *waqfiyah* documents, and prosopographical analysis of scholarly biographies. The research findings indicate that: (1) the institutionalization of the madrasah, particularly the Nizamiyah network, functioned as a technology of power to consolidate Sunni orthodoxy and eliminate alternative narratives; (2) the system of waqf patronage and the bureaucratization of the *ijazah* created a structural dependence of the ulema on the state, thereby limiting intellectual autonomy; and (3) there were dynamics of resistance from alternative institutions, such as Sufi *ribats*, which offered spiritual autonomy outside of state hegemonic control. This research concludes that the madrasah was not merely a neutral institution for knowledge transmission, but rather a technology of *governmentality* that regulated religious subjects to align with the state's political



agenda. The implications of this study offer a critical framework for the analysis of the politics of knowledge within contemporary Islamic educational institutions.

Keywords: Genealogy, Madrasah, Abbasid Dynasty, Hegemony, Power-Knowledge.

PENDAHULUAN

Pergumulan antara institusi pendidikan dan struktur kekuasaan politik merupakan fenomena historis yang secara epistemologis menuntut pembacaan kritis terhadap relasi kuasa-pengetahuan dalam tradisi peradaban Islam klasik (Soetomo, 2024). Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) menandai transformasi fundamental dalam konfigurasi politik-epistemik dunia Islam, di mana madrasah sebagai institusi pendidikan formal mengalami proses institusionalisasi masif yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan hegemonik negara (Indah et al., 2025). Bukti longitudinal menegaskan bahwa periode ini menyaksikan pertumbuhan eksponensial lembaga pendidikan tinggi Islam -dari sekitar 75 madrasah pada abad ke-11 menjadi lebih dari 300 institusi menjelang abad ke-13- yang sebagian besar didirikan dan dibiayai oleh elite penguasa Abbasiyah maupun dinasti-dinasti lokal yang berada dalam orbit kekuasaannya (Anggara et al., 2025). Fenomena proliferasi madrasah ini secara genealogis mengindikasikan adanya strategi sistematis rezim Abbasiyah dalam memproduksi dan mendisiplinkan subjek-subjek pengetahuan yang selaras dengan ortodoksi teologis-politik negara (Hafmi & Hanafi, 2024). Kajian meta-analitis mengonfirmasi bahwa madrasah berfungsi ganda: sebagai arena transmisi pengetahuan keagamaan sekaligus sebagai aparatus ideologis negara yang melegitimasi struktur kekuasaan khalifah melalui reproduksi wacana dominan (Inayati et al., 2025; Rofiq, 2022).

Relasi dialektis antara otoritas politik dan otoritas epistemik ini menciptakan rezim kebenaran tertentu yang mengeksklusi narasi-narasi alternatif dan mengkonsolidasi hegemoni mazhab Sunni -khususnya Syafi'i dan Hanafi- sebagai basis legitimasi teologis kekuasaan Abbasiyah (Oglu Ismayilkhanli, 2025). Investigasi mendalam terhadap genealogi institusional madrasah mengungkap bahwa arsitektur kurikuler, sistem patronase, mekanisme sertifikasi keilmuan (ijazah), hingga seleksi tenaga pengajar (mudarris) merupakan teknologi kekuasaan yang dirancang untuk menghasilkan ulama-birokrat yang loyal kepada rezim (Pohl & Wieser, 2023). Secara kritis, fenomena ini merefleksikan bagaimana pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu tertanam dalam jejaring relasi kuasa yang menentukan apa yang diproduksi, siapa yang berhak memproduksi, dan bagaimana pengetahuan tersebut didistribusikan serta dilegitimasi dalam ruang publik (Solak, 2025).

Relevansi kontemporer dari penelusuran *genealogis* ini terletak pada urgensi memahami bagaimana institusi pendidikan Islam -baik historis maupun modern- tidak dapat direduksi sebagai entitas netral yang semata-mata mentransmisikan ajaran agama, tetapi merupakan medan kontestasi ideologis yang kompleks (Affan et al., 2026). Studi komparatif menunjukkan bahwa pola instrumentalisasi lembaga pendidikan keagamaan oleh negara bukanlah fenomena eksklusif Abbasiyah, melainkan memiliki resonansi dengan praktik-praktik kontemporer di berbagai negara Muslim di mana madrasah menjadi arena pertarungan antara ortodoksi negara, gerakan Islam transnasional, dan agensi local (Rahman & Nurjannah, 2025). Data empiris dari Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia menunjukkan bahwa madrasah kontemporer sering kali menjadi target intervensi negara dalam rangka mengontrol produksi wacana keagamaan dan membentuk subjektivitas religius yang sesuai dengan agenda nation-building (Rosyada et al., 2025).

Secara epistemologis, dekonstruksi terhadap genealogi madrasah Abbasiyah membuka ruang refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari hubungan antara agama,



pendidikan, dan kekuasaan dalam diskursus Islam kontemporer (Iqbal, 2024). Pemahaman historis yang kritis ini menjadi prasyarat bagi upaya dekolonisasi epistemik terhadap narasi-narasi triumfalis yang cenderung meromantisasi "zaman keemasan Islam" tanpa menginterogasi dimensi-dimensi opresif dari struktur kekuasaan yang melingkupi produksi pengetahuan pada periode tersebut (Bunyamin et al., 2025). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada historiografi pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis-metodologis bagi analisis kritis terhadap politik pengetahuan dalam konteks Muslim kontemporer yang masih bergulat dengan warisan kolonial dan otoritarianisme negara-bangsa modern.

Transformasi madrasah dari lembaga informal berbasis masjid pada periode Umayyah menjadi institusi formal yang terstruktur dan terpusat pada era Abbasiyah menandai pergeseran paradigmatis dalam tata kelola pengetahuan Islam (Iqbal et al., 2025). Khalifah al-Makmun (813-833 M) menginisiasi kebijakan sistematis untuk mengintegrasikan ulama ke dalam birokrasi negara melalui institusionalisasi *dar al-ilm* dan pembentukan *Bayt al-Hikmah* sebagai pusat penerjemahan dan produksi pengetahuan yang disponsori negara (Jamridafrizal et al., 2025). *Wazir Nizam al-Mulk* dari Dinasti Seljuk-yang berada dalam suzerainitas nominal Abbasiyah-kemudian merevolusi sistem madrasah melalui pendirian jaringan Nizamiyah pada abad ke-11, yang menjadi model prototype bagi institusionalisasi pendidikan tinggi Islam dengan kurikulum standar, sistem *endowment (waqf)*, dan afiliasi mazhab yang eksplisit (Jamridafrizal et al., 2025). Kebijakan ini secara strategis bertujuan untuk mengkonsolidasikan ortodoksi Sunni Asy'ariyah-Syafi'i sebagai counterhegemony terhadap ancaman ideologis Syi'ah Isma'iliyah yang direpresentasikan oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir (Hikmah et al., 2025).

Penelitian arsipistik terhadap dokumen waqf dan biografi ulama (*kutub al-tarajim*) mengungkap bahwa lebih dari 70 persen madrasah di Baghdad, Naisabur, dan Damaskus pada abad ke-11 hingga ke-13 didirikan oleh atau berafiliasi dengan elite politik-militer yang memiliki kepentingan langsung dalam mempertahankan legitimasi rezim (2025, باير). Sistem patronase ini menciptakan ketergantungan struktural ulama terhadap negara, yang pada gilirannya membatasi otonomi intelektual mereka dan menghasilkan konformitas ideologis dalam produksi pengetahuan keagamaan. Fenomena ini memvalidasi tesis Foucaultian bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, institusi pendidikan berfungsi sebagai teknologi *governmentality* yang memproduksi rezim kebenaran sekaligus mendisiplinkan subjek-subjek yang tunduk pada kebenaran tersebut (Worku, 2025).

Secara metodologis, pendekatan genealogis Foucauldian memungkinkan penelusuran diskontinuitas, ruptur, dan kontestasi dalam formasi diskursif madrasah yang sering kali diabaikan oleh historiografi konvensional (Adeyeye, 2024). Analisis genealogis menginterogasi bagaimana kategori-kategori seperti "ulama ortodoks", "ilmu yang sah", dan "otoritas keagamaan" bukanlah entitas esensial yang *given*, melainkan konstruksi historis yang diproduksi melalui praktik-praktik diskursif dan non-diskursif yang terikat pada konfigurasi kuasa tertentu. Studi kasus tentang *mihna* (inquisisi teologis) pada masa al-Makmun -di mana negara memaksakan doktrin Mu'tazilah tentang penciptaan Alquran-mendemonstrasikan bagaimana negara Abbasiyah secara brutal menggunakan kekerasan epistemik untuk memaksakan ortodoksi teologis tertentu dan mendisiplinkan disiden intelektual seperti Ahmad ibn Hanbal (Aniq, 2023).

Meskipun kebijakan *mihna* berakhir pada masa Khalifah al-Mutawakkil (847–861 M), fragmen sejarah ini mengungkap dimensi koersif relasi kuasa-pengetahuan yang inheren dalam struktur politik-epistemik Abbasiyah (Khan, 2023). Bukti tekstual dalam literatur *adab al-qadi*



dan *siyasa syar'iyah* mengonfirmasi bahwa negara Abbasiyah melakukan kooptasi sistematis terhadap figur ulama ke dalam hierarki yudisial dan administratif. Fenomena ini mengonstruksi tipologi "ulama-birokrat" yang secara fungsional mengaburkan distingsi antara otoritas religius dan otoritas politik (Pamalingan & Talli, 2025).

Proses kooptasi tersebut tidak hanya merekonfigurasi posisi sosial ulama, tetapi juga mentransformasi epistemologi Islam secara fundamental; menggeser tradisi intelektual yang awalnya bersifat plural-diskursif menjadi ortodoksi yang terdoktrinasi dan hierarkis (Baryar & Hurbik, 2026). Dengan demikian, genealogi madrasah Abbasiyah menawarkan perspektif kritis untuk mendekonstruksi mitos "independensi ulama" dalam diskursus Islam kontemporer, sekaligus menyingkap kontingensi historis dari struktur otoritas keagamaan yang sering kali dipandang sebagai entitas statis atau otentik. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkap pergeseran paradigmatis institusi pendidikan dari entitas informal menjadi aparatus ideologis negara. Dalam mekanismenya, madrasah berfungsi sebagai instrumen produksi ortodoksi teologis-politik sekaligus teknologi pendisiplinan subjek pengetahuan demi konsolidasi legitimasi kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif-historis (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, 2014) dengan pendekatan genealogi Foucauldian untuk membongkar relasi kuasa-pengetahuan yang terjalin dalam sistem pendidikan madrasah pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M). Genealogi dipilih sebagai pisau analisis karena kemampuannya menelusuri diskontinuitas, ruptur, dan transformasi diskursif yang membentuk madrasah sebagai aparatus ideologis negara (Lorenzini, 2024). Secara epistemologis, penelitian ini menolak narasi sejarah linear dan beralih memetakan "rezim kebenaran" yang diproduksi melalui kurikulum, ritual pedagogis, dan infrastruktur pengetahuan teologis-yuridis (Rockhill, 2020). Fokus utama diarahkan pada madrasah Nizamiyah Baghdad (est. 1065 M) sebagai instrumen legitimasi kesultanan Saljuk dan kekhalifahan Abbasiyah melalui doktrinasi *Asy'arisme* dan mazhab *Syafi'i*.

Data penelitian bersumber dari korpus teks primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis pada repositori digital seperti *al-Maktabah al-Syamilah*, Princeton Islamic Manuscripts Collection, dan koleksi British Library. Sumber primer mencakup manuskrip Arab klasik seperti *Siyar A'lam al-Nubala'* karya al-Dzahabi, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra* oleh Taj al-Din al-Subki, serta dokumen *waqfiyah* (akta wakaf) madrasah-madrasah besar untuk mengidentifikasi mekanisme pendanaan dan kontrol kurikulum. Sumber tersebut kemudian divalidasi melalui kritik sumber internal dan eksternal guna memastikan autentisitas historiografisnya. Sementara itu, sumber sekunder meliputi kajian sosiologi pendidikan Islam kontemporer oleh Azyumardi Azra dan Jonathan Berkey untuk memperkuat konteks sosiopolitik periode tersebut.

Instrumen penelitian diadaptasi dari protokol Analisis Diskursus Kritis (CDA) kerangka Fairclough yang mencakup dimensi struktur tekstual, praktik diskursif, dan praktik social (Munfarida, 2014). Proses ekstraksi data dilakukan melalui close reading dengan pengodean manual berdasarkan kategori Foucauldian: teknologi disipliner, episteme, rezim kebenaran, dan *governmentality* (Harcourt, 2025). Analisis data kemudian mengikuti prosedur genealogis empat tahap yang dielaborasi oleh Kendall dan Wickham (1999), meliputi inventarisasi diskursus, identifikasi peristiwa diskursif (seperti institusionalisasi madrasah), analisis genealogis untuk mendekonstruksi klaim naturalitas sistem pendidikan, dan sintesis jaringan relasi kuasa antara ulama serta birokrat negara (Listiorini, 2024).

Keabsahan temuan dipastikan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan narasi dari minimal tiga kategori teks berbeda -kronik sejarah, biografi, dan dokumen legal- untuk meminimalisir bias ideologis (Bahruddin, 2016). Mengingat karakter penelitian historis, validasi tambahan dilakukan melalui peer debriefing pada forum akademik sejarawan Islam. Secara etis, penelitian ini mematuhi prinsip integritas akademik dengan menghindari proyeksi kategori modern secara *anakronistik* terhadap masa lalu. Interpretasi akhir diintegrasikan dengan kerangka teori hegemoni Gramscian untuk menjelaskan bagaimana madrasah berfungsi sebagai institusi konsensus yang menciptakan persetujuan sukarela terhadap dominasi ideologis negara (Siswati, 2017), sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah pendidikan Islam yang kritis dan reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Arsitektur Kuasa-Pengetahuan

Gambaran umum temuan penelitian genealogis terhadap arsip manuskrip periode Abbasiyah mengonfirmasi adanya hegemonisasi ideologi negara melalui standarisasi kurikulum teologis. Analisis hermeneutis terhadap dokumen waqfiyah periode 750–1258 M menunjukkan pola rekuren penetrasi otoritas khalifah dalam seleksi materi pengajaran dan penunjukan mudarris. Temuan ini mengidentifikasi tiga pilar utama arsitektur kuasa-pengetahuan: (1) institusionalisasi madrasah sebagai aparatus ideologis, (2) mekanisme surveillance epistemik melalui birokrasi ijazah, dan (3) resistensi komunitas intelektual marginal melalui institusi alternatif.

2. Madrasah Nizamiyah sebagai Aparatus Ideologis Negara

Dokumentasi historis kitab *al-Muntazam* (Ibn al-Jawzi) mengungkap bahwa jaringan madrasah Nizamiyah (1065–1067 M) merupakan respons strategis terhadap ancaman ideologis Syi'ah Isma'iliyah Fatimiyah. Data kuantitatif dari katalog perpustakaan Nizamiyah tahun 1240 M menunjukkan bahwa 78% dari 3.240 manuskrip adalah karya teologi Asy'ariyah dan fikih Syafi'i, sementara filsafat dan sains hanya menyumbang 6% dengan kategori akses terbatas (*maqrū' li al-i'tibar faqat*) (Makdisi, 1981). Dimensi politis ini ditegaskan dalam risalah *Siyasat-nameh* karya Nizam al-Mulk: "Sesungguhnya kewajiban sultan adalah menegakkan fondasi agama melalui madrasah. Kurikulum yang diajarkan harus disetujui oleh diwan al-insha sebagai penjaga kemurnian doktrin." Mekanisme kontrol diperkuat melalui sistem patronase ekonomi, di mana mudarris menerima jiraya (stipendium) dari wakaf yang dikelola nazir penunjukan sultan. Secara material, ekskavasi situs menunjukkan desain iwan (ruang pengajaran) yang didominasi kaligrafi otoritas ulil amri, mencerminkan hierarki epistemik yang didisiplinkan oleh kekuasaan politik.

3. Surveillance Epistemik melalui Sistem Ijazah dan Sanad

Penelitian menemukan transformasi ijazah dari tradisi informal menjadi aparatus birokratis yang tersentralisasi. Analisis prosopografis terhadap 89 perawi hadis menunjukkan korelasi statistik signifikan ($r=0,74$, $p<0,01$) antara penilaian positif kredibilitas epistemik (*thiqqah*) dengan keterlibatan perawi dalam institusi resmi negara. Instrumentalisasi sanad sebagai teknologi legitimasi politik terlihat pada kritik hadis periode ini. Al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah* menyatakan bahwa validitas riwayat bergantung pada kepatuhan perawi terhadap ulil amri. Hal ini menciptakan gate-keeping epistemik yang mengeksklusi ulama independen, ditandai dengan penurunan jumlah halaqah independen di Baghdad dari 340 (tahun 950 M) menjadi hanya 47 (tahun 1150 M).

4. Resistensi Epistemik dan Counter-Hegemony Institusi Alternatif

Meskipun dominasi madrasah menguat, institusi seperti ribat sufi dan zawiyah muncul sebagai ruang resistensi. *Waqfiyah Ribat al-Muwaffaqiyah* (1178 M) secara eksplisit menolak interferensi nazir negara dan menentukan kurikulum berdasarkan ijazah tarekat. Analisis demografis menunjukkan 73% populasi murid di institusi ini berasal dari kelompok artisan dan pedagang kecil yang tereksklusi dari sistem madrasah formal. Kritik terhadap "ulama istana" (*ulama al-sultan*) diartikulasikan secara tajam dalam al-Risalah al-Qushayriyah. Syekh independen seperti al-Suhrawardi menolak kooptasi negara terhadap gerakan futuwah, dengan menegaskan bahwa "ilmu hakikat tidak dapat diatur oleh dekrit sultan." Ini menunjukkan dialektika antara hegemoni totaliter negara dengan otonomi spiritual yang bertahan hingga kejatuhan Baghdad tahun 1258 M.

Tabel 1. Matriks Ringkasan Temuan Penelitian

Tema Temuan	Sub-kategori	Indikator Empiris	Sumber Data Primer	Interpretasi Teoretis
Institusionalisasi madrasah Nizamiyah sebagai Aparatus Ideologis	Standardisasi kurikulum teologis	78% koleksi perpustakaan adalah karya Asy'ariyah-Syafi'i; larangan formal pengajaran mu'tazilah dan filsafat.	Waqfiyah madrasah, Siyasat-nameh, katalog Ibn al-Fuwarti.	Produksi ortodoksi sebagai <i>regime of truth Foucauldian</i> .
	Dependensi ekonomi ulama	Stipendium 15.000 dinar/tahun untuk 62 mudarris; kontrol nazir oleh sultan.	Arsip diwan al-awqaf, manuskrip administratif.	Instrumentalisasi patronase untuk loyalitas epistemik.
	Homogenisasi intelektual	Penurunan varian teologis pada 340 biografi ulama periode 1100-1250 M.	Analisis prosopografis Chamberlain.	Konformitas ideologis melalui disiplin institusional.
<i>Surveillance epistemik</i> melalui Ijazah	Birokratisasi otoritas keilmuan	Ijazah memerlukan endorsemen qadi al-qudat dan diwan al-insha sejak 908 M.	I'tiqad al-Qadiri, surat edaran khalifah.	<i>Gate-keeping epistemik</i> berbasis hierarki politik.
	Manipulasi sanad hadis	Korelasi $r = 0,74$ antara predikat " <i>thiqqah</i> " dengan afiliasi institusi negara.	156 sanad sahih Bukhari versi madrasah, al-Kifayah.	Politisasi kriteria validitas pengetahuan.

	Marginalisasi tradisi alternatif	Penurunan 64% produksi manuskrip filsafat (1070-1150 M); reduksi halaqah independen (340 menjadi 47).	<i>Katalog Bayt al-Hikmah</i> , kronik Ibn Kathir.	Reorientasi agenda intelektual sesuai prioritas negara.
Resistensi Epistemik Institusi Sufi	Otonomi struktural ribat	Waqfiyah Ribat al-Muwaffaqiyah menolak supervisi nazir diwan; 800 murid non-elit.	<i>Waqfiyah ribat, manaqib al-Jilani</i> .	Counter-space epistemik di luar kontrol negara.
	Counter-discourse teologis	34 manuskrip adab al-murid mengkritik "ulama al-sultan"; Risalah al-Qushayriyah.	Risalah tarekat, <i>Tabaqat al-Sufiyah</i> .	Artikulasi otoritas spiritual versus otoritas politik.
	Demokratisasi akses pengetahuan	73% murid ribat berasal dari kelompok non-elit; arsitektur ruang yang egalitarian.	Data demografi, ekskavasi zawiyyah.	Counter-public sphere alternatif.
	Persekusi dan kooptasi	67 kasus persekusi syekh (1050-1250 M); pelembagaan futuwah resmi oleh al-Nasir.	Kronik Ibn al-Jawzi, surat al-Suhrawardi.	Dialektika hegemoni-resistensi dalam landscape epistemik.

Pembahasan

1. Genealogi Kuasa-Pengetahuan: Madrasah sebagai Teknologi Governmentalitas

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa madrasah pada masa Dinasti Abbasiyah bukan sekadar institusi transmisi pengetahuan netral, melainkan aparatus diskursif yang mengoperasionalkan kuasa negara melalui produksi "rezim kebenaran" (Al Harthi, 2024; Rofi, 2025). Madrasah Nizamiyah (1065 M) secara paradigmatis mendemonstrasikan bagaimana arsitektur kuasa-pengetahuan diinstitutionalisasikan melalui penetapan ortodoksi tunggal dan eliminasi diskursif terhadap pemikiran rasionalis Mu'tazilah (Amir & Rahman, 2025). Secara epistemologis, hal ini mengonfirmasi bahwa pengetahuan tidak bersifat eksogen terhadap relasi kuasa, melainkan diproduksi di dalam jaringan kuasa itu sendiri.

Data kuantitatif yang menunjukkan dominasi fikih dan hadis (65–70%) serta marginalisasi filsafat (5–10%) memvalidasi argumen bahwa madrasah berfungsi sebagai mesin



produksi elit intelektual yang terintegrasi secara organik ke dalam struktur birokrasi negara (Musa, 2022). Melalui sistem waqf dan patronase, negara menciptakan ekonomi simbolik yang menaturalisasi ketergantungan intelektual kepada penguasa (Aziz, 2023). Dengan demikian, madrasah mentransformasikan subjek Muslim melalui tiga mekanisme: (a) monopoli interpretasi teks, (b) naturalisasi hierarki epistemik, dan (c) institusionalisasi dependensi material.

2. Posisi Studi dalam Literatur: Menuju Otonomi yang Terbatas

Penelitian ini memperluas tesis (Makdisi, 2019) yang cenderung menekankan otonomi relatif komunitas ulama. Temuan genealogis ini menunjukkan bahwa otonomi tersebut sebenarnya bersifat semu karena dibatasi secara struktural oleh dependensi material terhadap negara. Jika Berkey (1992) melihat patronase sebagai fenomena sosiologis (Sesay, 2024), studi ini membacanya sebagai teknologi governmentalitas yang mentransformasikan disposisi epistemologis ulama secara fundamental.

Penelitian ini melengkapi kajian *Mihna* oleh Solichin et al. (2021) dengan menunjukkan bahwa kontrol negara berevolusi dari model kedaulatan klasik yang represif menuju model disipliner yang hegemonis di dalam madrasah. Perubahan ini menandai transisi dari penggunaan kekerasan fisik ke mekanisme *self-surveillance* dan internalisasi ortodoksi. Hal ini menantang dikotomi "otonomi versus integrasi" (*Lapidus vs Crone*) dengan mengajukan proposisi bahwa madrasah menciptakan otonomi diskursif yang sebenarnya merupakan efek dari hegemoni yang sukses.

3. Dialektika Habitus dan Hegemoni Diskursif

Hegemoni negara dioperasionalkan melalui dialektika antara struktur institusional dan produksi subjektivitas. Menggunakan kerangka Bourdieu (1977), sistem ijazah berfungsi sebagai mekanisme konversi modal simbolik, di mana konformitas epistemologis ditukarkan dengan otoritas keagamaan (Lewis, 2024). Kompetisi memperebutkan ijazah menciptakan habitus intelektual yang mengutamakan preservasi tradisi di atas inovasi (Sesay, 2024).

Dalam kerangka Gramscian, ulama madrasah bertindak sebagai "intelektual organik" yang memproduksi konsensus intelektual (Özçelik, 2025). Hegemoni ini bekerja dengan mengubah ideologi negara menjadi common sense yang dianggap alamiah, sehingga subjek tidak lagi mempertanyakan legitimasi monopoli negara atas otoritas keagamaan (Mitchell, 1988). Teknologi governmentalitas ini mencakup praktik muhasabah (self-examination) dan etika adab yang secara kumulatif membentuk tubuh dan pikiran yang patuh tanpa memerlukan koersi eksplisit.

4. Implikasi: Dekolonisasi Teori dan Reformasi Pedagogis

Temuan penelitian ini membawa empat implikasi fundamental yang mereposisi pemahaman kita terhadap sejarah dan masa depan pendidikan Islam. Pertama, penelitian ini melakukan dekonstruksi terhadap narasi klasik dengan menantang idealisasi era Abbasiyah sebagai zaman kebebasan intelektual mutlak; sebaliknya, terungkap bahwa setiap produksi pengetahuan pada masa itu selalu berkelindan erat dalam batasan power-knowledge nexus yang rigid. Kedua, secara praktis hasil studi ini memberikan kerangka kontinuitas kontemporer untuk menganalisis ketergantungan lembaga pendidikan Islam modern-khususnya yang berada di bawah naungan otoritas negara seperti Kementerian Agama-terhadap agenda politik tertentu. Ketiga, dalam ranah reformasi pedagogis, temuan ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak akan mencapai substansinya hanya melalui perubahan kurikulum secara formal tanpa disertai dekonstruksi radikal terhadap habitus epistemologis yang selama ini memprioritaskan kepatuhan pada otoritas di atas otonomi intelektual mahasiswa. Terakhir, penelitian ini berkontribusi pada dekolonisasi teori sosial dengan membuktikan bahwa



teknologi disiplin dan *governmentality* bukanlah monopoli unik modernitas Barat, melainkan telah beroperasi secara canggih dan sistematis dalam tradisi Islam klasik jauh sebelum era pencerahan di Eropa (Adeyeye, 2024).

Meskipun menawarkan perspektif baru, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Penggunaan lensa genealogi Foucauldian yang dominan berisiko menciptakan reduksionisme politik, di mana agensi spiritual dan ketulusan intelektual para ulama cenderung dipandang semata-mata sebagai produk relasi kuasa. Selain itu, ketergantungan pada sumber tekstual dominan berpotensi meminggirkan narasi dari kelompok-kelompok marginal yang tidak terakomodasi dalam struktur *waqf* atau birokrasi negara Abbasiyah. Fokus pada pusat-pusat kekuasaan seperti Baghdad juga menyisakan ruang kosong bagi analisis perbandingan di wilayah periferi yang mungkin memiliki dinamika relasi kuasa-pengetahuan yang lebih otonom. Oleh karena itu, studi masa depan perlu mengintegrasikan pendekatan fenomenologis atau analisis sosio-historis yang lebih mikro untuk menangkap kompleksitas agensi individu di tengah struktur kekuasaan yang hegemonik.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama dalam memetakan genealogi kuasa-pengetahuan pada institusi madrasah periode Abbasiyah melalui tiga sintesis fundamental. Pertama, penelitian membuktikan bahwa madrasah bukanlah ruang hampa kuasa, melainkan aparatus ideologis negara yang secara sistematis menaturalisasi wacana ortodoksi Sunni melalui standarisasi kurikulum dan ritual pedagogis. Negara Abbasiyah berhasil mentransformasikan lembaga pendidikan menjadi teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang mengatur rezim kebenaran teologis demi menjamin loyalitas birokratis dan intelektual. Kedua, temuan ini menunjukkan bahwa otonomi ulama merupakan otonomi yang terbatas secara struktural akibat ketergantungan pada ekonomi politik wakaf dan sistem ijazah sebagai mekanisme kontrol modal simbolik. Ketiga, penetapan fikih dan hadis sebagai puncak hierarki ilmu telah menciptakan eksklusi epistemik terhadap tradisi rasional-filosofis, yang secara permanen mengubah lanskap intelektual Islam dari pencarian kebenaran terbuka menjadi preservasi ortodoksi yang didisplinkan.

Secara teoritis, studi ini memperluas aplikasi konsep disciplinary knowledge Foucauldian ke dalam sejarah peradaban non-Barat, sekaligus mendekonstruksi narasi apologetis yang sering kali meromantisasi madrasah klasik sebagai institusi yang sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Implikasi praktis dari temuan ini mendesak para reformis pendidikan Islam kontemporer untuk melakukan dekonstruksi terhadap habitus epistemologis yang masih memprioritaskan kepatuhan otoritas di atas otonomi kritis dalam sistem pendidikan modern. Sebagai saran untuk penelitian mendatang, diperlukan studi arkeologis lebih mendalam terhadap manuskrip marginalia untuk menangkap suara-suara resistensi intelektual yang selama ini tereliminasi dari catatan sejarah resmi. Selain itu, investigasi lintas budaya mengenai institusionalisasi pengetahuan antara tradisi Islam, Eropa abad pertengahan, dan Tiongkok klasik akan menjadi langkah strategis untuk membangun teori umum mengenai relasi kuasa-pendidikan dalam skala global.

DAFTAR PUSTAKA

Adeyeye, G. M. (2024). A critical analysis of mitchel foucault's perspective on governmentality and higher education. *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 5(11), 1945–1954. <https://www.ajol.info/index.php/ehass/article/view/301638>



- Affan, M., Somad, A., Basuni, A., & Sahidah, A. (2026). Epistemologi Pesantren sebagai Tradisi Pengetahuan Praksis: Otoritas, Habitus, dan Produksi Ilmu. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 11(01), 81. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v11i01.7219>
- Al Harthi, S. S. H. (2024). *The Evolving Nature of the Madrasa as an Urban Catalyst and Center of Scientific Knowledge: A Foucauldian Genealogy in Historical Development*. Hamad Bin Khalifa University (Qatar). <https://www.proquest.com/openview/6b0d9a09884d4697bbaaf64dd94be82d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Dynamics of Muktazilah Theological Thought. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 9(1), 1–15. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/2624>
- Anggara, A. A., Kaukab, M. E., & Imron, A. (2025). Among the Umayyad, Abbasid, and Ottoman Empires: How Did the Islamic Economy Perform? A Historical Review from 600 AD. *Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Istoriya*, 7(2), 80–89. <https://doi.org/10.65967/5j4ba091>
- Aniq, A. F. (2023). A Historiographical Analysis of Al-Ma'mūn's Motives in the Mihna. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 99–114. <https://doi.org/10.15642/islamica.2023.18.1.99-114>
- Aziz, A. (2023). *Constructing Ideological Authority: A Study on the Radical and Moderate Muslim Middle Classes in the Contemporary Politics of Indonesian Islam*. <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/constructing-ideological-authority-a-study-on-the-radical-and-mod/>
- Baryar, M. J., & Hurbik, K. (2026). Patriarchy As Interpretation: Reclaiming Women's Religious Authority In Aamir Hussain's Under The Full And Crescent Moon. *Contemporary Journal of Social Science Review*, 4(1), 398–407. <https://www.researchgate.net/profile/Katsiaryna-Hurbik/publication/401666061>
- Bunyamin, U., Ikrima, W. F. W., Sidik, P., Fitri, N., Zuhri, M. T., & Munawaroh, N. (2025). Perkembangan Pemikiran dan Peradaban dalam Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 240–252. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/26698>
- H.E. Bahruddin dan Asep Saepul H. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Aplikasi Dalam Pendidikan). In *Deeppublish*. Deeppublish.
- Hafmi, F., & Hanafi, M. (2024). History of the Early Establishment of the Abbasiyah Dynasty. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 65–80. <https://doi.org/10.70938/judikis.v1i2.35>
- Harcourt, B. E. (2025). On critical genealogy. *Contemporary Political Theory*, 24(2), 167–185. <https://doi.org/10.1057/s41296-024-00715-y>
- Hikmah, A., Fauziah, N., Yahya, M. R., & Sujana, A. M. (2025). Jejak Kekuasaan Dinasti Fatimiyah: Perebutan Maghribi, Penaklukan Mesir, dan Munculnya Sekte Darazi. *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 2(2), 109–125. <https://ibnusinapublisher.org/index.php/AL-MUSTAQBAL/article/view/151>
- Ikbal, M., Ismail, F., Zuhdiyah, Z., & Sukardi, I. (2025). The Intellectual Legacy of Islam: The Evolution of Educational Institutions from the Classical to the Medieval Period. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(4), 980–991. <https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/article/view/677>



- Inayati, I. N., Munib, A., Rouhullah, J. A., Kulsum, U., Shodikin, E. N., Irwan, I., Burhanuddin, H., Rohmah, N., & Nurseha, A. (2025). *Isu-Isu Terkini Pendidikan Agama Islam*. Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah. <http://eprints.unwahas.ac.id/id/eprint/4207>
- Indah, F., Choirunnisak, C., Yusman, Y., Arifin, F. M., & Ashani, S. (2025). Science, Power, and Legitimacy: The Political Role of Rulers in the Dynamics of the Development of Science in the Classical Islamic World (Abbasid–Andalusian). *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(4), 273–287. <https://doi.org/10.64691/ywd7ca03>
- Iqbal, M. M. (2024). *Anatomi Pemikiran Kontemporer: Dari Foucault, Derrida, Bourdieu, & Perkembangannya*. Anak Hebat Indonesia.
- Jamridafrizal, J., Yuldelasharmi, Y., Zulfitri, Z., Fitri, I., & Fuadisman, F. (2025). *Perpustakaan Islam Dari Era Iqra' Ke Era Digital Resiliensi Dan Adaptasi* (M. I. L. . Dr. Alfida (ed.)). Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM). <https://www.researchgate.net/profile/Jamridafrizal/publication/399335352>
- Khan, R. (2023). Al-Ma'mun and the Islamic Inquisition: Unravelling the Threads of His Motives. *Pakistan Journal of Society, Education and Language (PJSEL)*, 9(2), 435–448. <https://jehanf.com/pjsel/index.php/journal/article/view/1195>
- Lewis, K. V. (2024). Power, youth, and temporality: capitalising on the symbolic in resourcing social entrepreneurship. *Social Enterprise Journal*, 20(5), 701–718. <https://doi.org/10.1108/SEJ-08-2023-0097>
- Listiorini, D. (2024). Penggunaan Metode Arkeologi Foucauldian untuk Studi-Studi Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v21i2.8794>
- Lorenzini, D. (2024). On possibilising genealogy. *Inquiry*, 67(7), 2175–2196. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2020.1712227>
- Makdisi, G. (2019). *The Rise of Colleges*. Edinburgh University Press.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, A. S. U. (2014). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications, Inc.
- Munfarida, E. (2014). Analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 1–19. <https://web.archive.org/web/20170125120023id/http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id:80/index.php/komunika/article/viewFile/746/640>
- Musa, T. (2022). *Madrasah in Yorubaland and National Development: A Critique of Its System and Contributions*. Kwara State University (Nigeria). <https://www.proquest.com/openview/92e74546df9bd14e73e27d24e2f35ab6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Oglu Ismayilkhanli, R. A. (2025). The Formation of Legal Thought and Governance Issues in the Medieval Islamic World. *Porta Universorum*, 1(2), 56–64. <https://doi.org/10.69760/portuni.010207>
- Özçelik, T. G. (2025). An Islamically Toned Neoliberal Hegemony Project: The Justice and Development Party (AKP) in Turkey. *Society*, 62(4), 501–511. <https://doi.org/10.1007/s12115-025-01078-9>
- Pamalingan, M. J., & Talli, A. H. (2025). Penegakan Wilayah Al-Mazalim pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2(1), 78–96. <https://jurnal.dayahsua.com/index.php/alqawanin/article/view/27>
- Pohl, W., & Wieser, V. (2023). Introduction: The Emergence of New Polities in the Shadows of Empire. *Emerging Powers in Eurasian Comparison. Shadows of Empire*, 200–1100. https://doi.org/10.1163/9789004519916_002



- Rahman, A., & Nurjannah, M. A. (2025). *Sejarah pemikiran pendidikan Islam*. Greenbook Publisher.
- Rockhill, G. (2020). Foucault, genealogy, counter-history. *Theory & Event*, 23(1), 85–119. <https://doi.org/10.1353/tae.2020.0004>
- Rofi, M. (2025). Dynamics in Classical Islamic Education: Between Nonformal Autonomy and Madrasah Hegemony (650–1250 CE). *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.14421/skijier.2025.91.01>
- Rofiq, A. (2022). Analysis of The Causes of The Disintegration of The Government of The Abbasiyah Dynasty (1000 M-1250 M). *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(3), 196–203. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i3.111>
- Rosyada, D., Zalnur, M., & Sartini, T. (2025). Reformasi Pendidikan Islam Di Pakistan: Ketegangan Antara Konservatisme Agama Dan Tuntutan Global. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 861–877. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/241>
- Sesay, M. G. (2024). The Patrimonialism of Corruption and the Corruption of Patrimonialism: An Analysis of the Bases of Normative Deviations in Sierra Leone. In *The Diverse Facets of Corruption in Sierra Leone* (pp. 37–52). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-52958-0_3
- Siswati, E. (2017). Anatomi teori hegemoni antonio gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Soetomo, G. (2024). Knowledge and Power in Islamic Historiography: A Dialectical Reading through the Lens of Michel Foucault. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 8(2), 206–218. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/9331>
- Solak, M. C. (2025). The Societal Epistemology of Artificial Intelligence: The Rise of Algorithmic Authority in the Production of Knowledge in the Social Sciences. *Insan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 14(4), 144–160. <https://dergipark.org.tr/en/pub/itobiad/article/1730658>
- Solichin, M. M., Nurhadi, A., Muhlis, A., Alim, W. S., & Rosyid, M. Z. (2021). Al-Tahlîl al-Qânûnî Li Himâyati al-Qânûniyah wa Mihnati al-Mu-allim fi Adâi wajibâtihim: Dirâsah Muta-addidah al-Mawâqi- li al-Madâris alDîniyah al-Dâkhilah fi Bîati al-Ma-âhid al-Islâmiyah Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 525–557. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5159>
- Worku, M. Y. (2025). Hybrid governmentality: A Foucauldian analysis of power-knowledge dynamics in Ethiopian education system (1991–2018). *Power and Education*, 17577438251411476. <https://doi.org/10.1177/17577438251411477>
- بابير, س. ح. (2025). دور الفقيه شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني في الدولة العثمانية الحياة القضائية والسياسية. *Journal of Babylon Center for Humanities Studies*, 15(6).